

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Periansya

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Periansya@Polsri.ac.id

Abstract

This research was conducted with the aim to know the regional wealth, revenue sharing fund and general allocation fund to the independence of regional finance at the Government of Regency/City in South Sumatra Province. This research was conducted in the period 2014 until 2017. The population in this study is all of Regency/City in the Province of South Sumatra. Sample determination is determined by the Purposive sampling technique as many as 11 regencies/cities in South Sumatera Province. The type of research is quantitative research with secondary data. Form the Budget Realization from the Audit Result Report (LHP) BPK RI 2014 – 2017. The analytical method used is multiple linear regression analysis with panel data. The results showed that the regional wealth and general allocation fund partially influenced the direction of a positive relationship to regional financial independence. While revenue sharing funds partially did not influence regional financial independence. In addition simultaneously regional wealth, revenue sharing funds and general allocation funds simultaneously have a significant effect on regional financial independence at the government of regency/city in South Sumatra Province.

Keywords: *Regional Wealth, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Regional Financial Independence*

PENDAHULUAN

Selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat karena menggunakan sistem sentralisasi. Namun paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah, pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Rochmah, 2015).

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia hingga potensi sumber daya keuangan secara optimal. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD dapat meningkat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan PAD di dalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat lebih mendominasi susunan APBD. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan 46,6% dari APBD tingkat provinsi masih berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan tingkat ketergantungan APBD tingkat kabupaten/kota terhadap suntikan pusat lebih tinggi lagi, yaitu mencapai 66,4% (www.cnnindonesia.com, 2017). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau pihak eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPK RI, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 adalah 12,35%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera selatan masih rendah atau dengan kata lain masih dominannya peran pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Selain PAD, kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh faktor lain, diantaranya dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dalam penelitian sebelumnya, Erawati & Suzan (2015) menunjukkan bahwa PAD mempunyai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Novalistia (2016) menemukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun Penelitian yang dilakukan Sari (2015) menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Baik
10,01-20,00	Baik
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Kurang
>50,00	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM dalam Bisma & Susanto (2010)

Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa pendapatan asli daerah (Armaja, Ibrahim, & Aliamin, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana bagi hasil pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian daerah yang berasal dari penenamaan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Adapun dana bagi hasil sumber daya alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

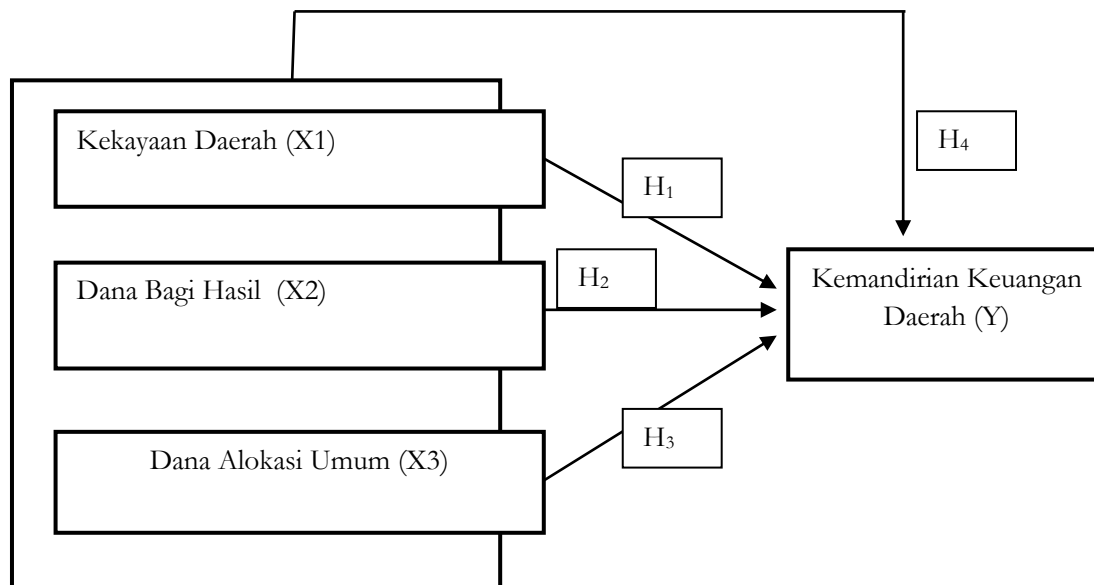
Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum diberikan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah sedangkan celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah belanja rata-rata, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil yang diterima daerah (Halim, 2016).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2014). Artinya semakin Besar Pendapatan

Asli Daerah maka Kemandirian keuangan daerah Semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H1 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Kemandirian Keuangan Daerah

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H2 : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Halim, 2014). Dana alokasi umum sendiri merupakan salah satu pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap dana alokasi umum cenderung tidak mandiri. Artinya semakin besar penerimaan dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik hipotesis:

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh Negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen kemandirian keuangan daerah. Variabel kekayaan daerah merupakan variabel independen yang besarnya sangat berpengaruh terhadap naik turunnya kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum dana transfer umum yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan berdampak pada meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis:

H4 : Kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan variabel penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel dependennya adalah kemandirian keuangan daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang laporan keuangannya telah diaudit BPK tahun 2014 – 2017.
2. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang laporan keuangannya memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI berturut-turut tahun 2014-2017.

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2

Sampel dan Observasi

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang laporan keuangannya telah diaudit BPK tahun 2014 – 2017	17
Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang laporan keuangannya memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI berturut-turut tahun 2014-2017	11
Jumlah Tahun Penelitian	4
Jumlah Unit Analisis	44

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 yang diperoleh dari BPK RI melalui laman <http://bpk.go.id>.

Model Penelitian

Dalam penelitian ini model yang digunakan menggunakan regresi linear berganda. Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Variabel Kemandirian keuangan pemerintah daerah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Variabel Kekayaan Daerah

X2 = Variabel Dana Bagi Hasil

X3 = Variabel Dana Alokasi Umum

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengelola data yang terkumpul untuk dilakukan analisa. Data yang akan dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan pemeriksa keuangan. Dalam analisis ini juga dilakukan :

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Autokorelasi
 - c. Uji Multikolinearitas
 - d. Uji Heteroskedastisitas
1. Koefisien Determinasi
2. Uji Hipotesis
 - a. Uji Statistik t
 - b. Uji Statistik F

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum di dalam tabel, sedangkan nilai tertinggi dari data ditunjukkan oleh skor maksimum. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data, dan standar deviasi menunjukkan simpangan baku. Berikut hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kekayaan Daerah	44	,03	,32	,0915	,06192
DBH	44	91300772439,00	2416335642901,00	396375995090,5908	502474820996,54260
DAU	44	131033381000,00	1292124896000,00	653972316954,5455	284357443461,68646
Kemandirian Keuangan Daerah	44	,04	,47	,1113	,09200
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Output SPSS

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 44, nilai minimum variabel independen kekayaan daerah adalah 0,03 dan nilai maksimum 0,32. Nilai rata-ratanya adalah 0,915 dengan standar deviasi 0,6192. Nilai minimum variabel

independen dana bagi hasil adalah Rp91,3 Miliar dan nilai maksimum Rp2,4 Triliun. Nilai rata-ratanya adalah Rp396,375 Miliar dengan standar deviasi Rp502,474 Miliar. Nilai minimum variabel independen dana alokasi umum adalah Rp131 Miliar dan nilai maksimum Rp1,2 Triliun. Nilai rata-ratanya adalah Rp654 Miliar dengan standae deviasi Rp284,4 Milyar. Nilai minimum variabel dependen kemandirian keuangan daerah adalah 0,04 dan nilai maksimum 0,47. Nilai rata-ratanya adalah 0,1113 dengan standar deviasi 0,9200.

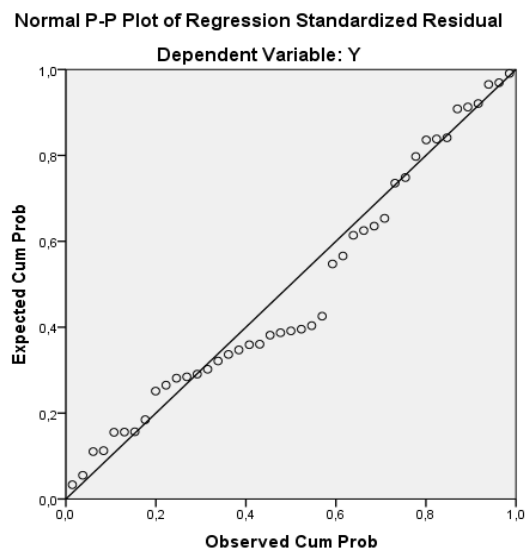
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilihat dengan menggunakan penyebaran data (titik) pada normal P *Plot of Regression Standardized Residual* variabel independen..Hasilnya menunjukkan bahwa uji Normalitas data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot* berdistribusi normal dimana titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 2

Grafik *Normal Probability Plot*



Sumber:Output SPSS

Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson (DW test). Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,687. Dengan jumlah data (n) sama dengan 44 dan jumlah variabel (k) sama dengan 3 serta $\alpha=5\%$ diperoleh angka $dL=1,3749$ dan $dU=1,6647$. Nilai DW terletak di antara nilai batas dL dan dU atau dapat dirumuskan

dengan $du < DW < 4-du$ yaitu $1,6647 < 1,687 < 2,3353$, maka model persamaan regresi yang diajukan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji Multikolinearitas

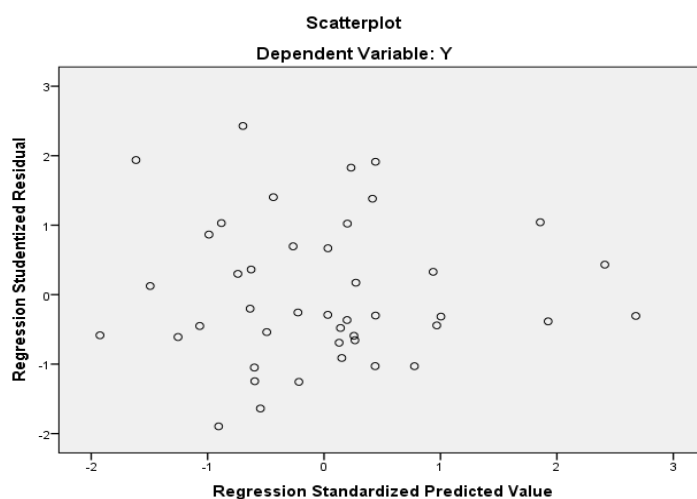
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas diketahui nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Model regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Uji heteroskedastisitas dengan diagram scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik yang menggambarkan data menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan. Tampak seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3

Diagram Scatterplot



Sumber: Output SPSS

Koefisien Determinasi

Dalam Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besaran nilai kolerasi antara variabel independen (X) yang terdiri dari Kekayaan Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3), terhadap variabel dependen (Y) Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 6 berikut:

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,993 ^a	,987	,986	,05923	1,687

Sumber: Output SPSS

Hasil *output* uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,993. yang berarti bahwa korelasi antara variabel dependen dan variabel independen adalah sebesar 0,993. Hal ini berarti hubungan yang sangat erat karena nilai mendekati 1. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* adalah 0,986. Hal ini berarti sebesar 98,6% variabel dependen atau Kemandirian keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. variabel independen yang digunakan dalam model (Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) mampu menjelaskan sebesar 98,6 % variabel dependen (Kemandirian keuangan daerah). sedangkan sisanya sebesar 1,4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Model Regresi

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Beta
		B	Std. Error	
1	(Constant)	-,1093	,629	
	X1	1,101	,023	,967
	X2	-,012	,014	-,016
	X3	,084	,026	,068

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 5 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,093 + 1,101 X_1 - 0,12X_2 + 0,084X_3$$

Model regresi tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta (a) sebesar $-1,093$ artinya apabila nilai variabel Kekayaan Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3) bernilai konstan (0), maka nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar $-1,093$.
2. Koefisien b_1 untuk variabel Kekayaan Daerah (X_1) sebesar $1,101$ menunjukkan pengaruh X_1 terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) berpola positif sehingga semakin bertambah Kekayaan Daerah maka semakin Tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien Kekayaan Daerah (X_1) sebesar $1,101$ artinya setiap kenaikan 1% variabel Kekayaan Daerah (X_1) akan menaikkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar $1,101\%$.
3. Koefisien b_2 untuk variabel Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar $-0,12$ menunjukkan pengaruh Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) berpola negatif, sehingga semakin bertambah Dana Bagi Hasil (X_2) maka semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Nilai koefisien Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar $-0,12$ artinya setiap pertambahan 1% variabel Dana Bagi Hasil (X_2) akan menurunkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar $-0,12\%$.
4. Koefisien b_3 untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_3) sebesar $0,084$ menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dan berpola positif sehingga semakin bertambah Dana Alokasi Umum (X_3) maka semakin tinggi Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dengan nilai koefisien sebesar $0,084$ artinya setiap pertambahan 1% variabel Dana Alokasi Umum (X_3) akan menaikkan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar $0,084\%$.

Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen atau Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen atau Kemandirian Keuangan Daerah. Berikut ini adalah hasil uji statistik t.

Tabel 6
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		Std.				
Model		B	Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,093	,629		-1,739	,090
	kekayaan daerah	1,101	,023	,967	48,808	,000
	DBH	-,012	,014	-,016	-,855	,398
	DAU	,084	,026	,068	3,282	,002

Sumber: Output SPSS

1. Pengaruh Kekayaan Daerah (X_1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
 Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 48,808 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Kekayaan Daerah (X_1) menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 48,808 > t-tabel 2,015 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga variabel Kekayaan Daerah (X_1) secara parsial terdapat berpengaruh dengan arah hubungan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
 Hasil Uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar -855 dengan signifikansi sebesar 0,398. Nilai signifikan untuk variabel Dana Bagi Hasil (X_2) menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung -855 > t-tabel sebesar -2,015, yang artinya bahwa H2 diterima sehingga variabel Dana Bagi Hasil (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
 Hasil Uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,282 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_3) menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung 3,282 > t-tabel sebesar 2,015 yang artinya bahwa H3 diterima sehingga variabel Dana Alokasi Umum (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Uji Statistik F

Uji statistik F ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,191	3	3,397	968,368	,000 ^b
	Residual	,137	39	,004		
	Total	10,327	42			

Sumber: Output SPSS

Hasil Uji statistik F pada tabel 7 diatas untuk menguji pengaruh Kekayaan Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Nilai F-hitung sebesar 968,368 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 968,368 > F-tabel sebesar 2,84 yang artinya H4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Daerah, Dana Bagi

Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh dengan arah hubungan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika pendapatan asli daerah suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Pada pelaksanaan otonomi daerah maka sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Artinya besaran Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari keberhasilan Desentralisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Rahayu, & Yudowati(2016) yang menyatakan bahwa Kekayaan Daerah berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah. Dari uji signifikan secara parsial ini maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kekayaan daerah berpengaruh dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana bagi hasil merupakan komponen dana transfer umum yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Halim (2016) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan DBH. sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DBH sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Dalam penelitian ini Dana bagi hasil yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan belum mampu digunakan serta dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa

penggunaan Dana bagi hasil belum mampu mencapai target dan tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum mampu menghasilkan output yang berdampak padapeningkatatan dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Kondisi ini terjadi disebabkan karena permasalahan penyaluran Dana bagi hasil yang sering muncul, yaitu adanya praktek pembagian triwulanan yang tidak tepat waktu merupakan keluhan bagi daerah penerima Dana bagi hasil, ketika sudah dibayarkan masih muncul permasalahan yaitu kelebihan atau kekurangan pembayaran untuk suatu daerah. Hal ini mengakibatkan terganggunya sistem perencanaan pembangunan di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kebutuhan dana aloksi umum suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal gap, dimana fiscal gap tersebut ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Halim (2016) menjelaskan bahwa Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Pemerintah daerah pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan. Dalam penelitian ini dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan sudah digunakan serta dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal.

Hal ini menunjukan bahwa penggunaan dana alokasi umum sudah bisa mencapai target dan tujuan kepentingan publik serta penggunaannya sudah bisa menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Hal ini terlihat dengan adanya hubungan yang positif antara dana alokasi umum dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan sudah dimanfaatkan untuk sektor sektor produktif yang berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak hanya di proyeksikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah. Dari uji signifikan secara parsial ini maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) F-hitung sebesar 968,368 > F-tabel sebesar 2,84 dengan nilai signifikan 0,000 nilai ini lebih kecil dari nilai propitabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_{a5} diterima dan H_{05} ditolak yang artinya bahwa variabel independen yaitu Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kemandiran Keuangan daerah. Hal ini menunjukan bahwa ketika kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat Kekayaan Daerah yang cukup tinggi, mendapatkan hasil Dana Bagi Hasil yang tinggi, serta menerima transfer Dana Alokasi Umum banyak dengan jumlah besar dan dengan

sistem pembagian yang tepat serta pengelolaan yang tepat maka akan mempengaruhi baiknya tingkat Kemandirian Keuangan daerah daerah tersebut.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Novalistia (2016) yang menyatakan Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2015) yang menyatakan pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh Signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekayaan daerah dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan arah koefisien positif. Sedangkan dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, kekayaan daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian. Selain itu juga diharapkan dapat menambah jangka waktu penelitian guna untuk meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 168–181.
- Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 75–86.
- Erawati, N., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding Of Management*, 2(3).
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salempa Empat.
- _____. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salempa Empat.
- Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Rochmah, S. N. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

-
- _____. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sari, P. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)*.
- Susanti, D., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *E-Proceeding Of Management*, 3(3), 3308–3314.